



PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Merdeka No. 90, Pematangsiantar  
Telp. (061) 79810710

# LAKIP | 2024

Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

BAPPEDA  
KOTA PEMATANGSIANTAR

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Sepanjang Tahun 2024, Bappeda telah melaksanakan beberapa Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Terlaksananya penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan ini merupakan kerja keras dan dukungan para seluruh *stakeholder* yang terkait dengan Bappeda Kota Pematangsiantar. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan untuk waktu yang akan datang, terlebih dalam upaya pencapaian Visi Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar terhadap seluruh akuntabilitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini tidak luput dari kekurangan sehingga diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini, kami ucapkan terimakasih yang tulus, semoga Allah SWT menerimanya sebagai amal ibadah, Amin.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR

Kepala,

DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19811130 200312 1 003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategi Organisasi.....	8
1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategi).....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>22</b>
2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	22
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	29
2.3 Rencana Strategis.....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....</b>	<b>32</b>
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini .....	32
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	36
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	37
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional ....	38
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan.....	40
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	53
<b>3.2 Realisasi Anggaran.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>4.1 Saran dan Rekomendasi.....</b>	<b>64</b>
4.1.1 Saran.....	64
4.1.2 Rekomendasi.....	65
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Jumlah Pegawai Bappeda.....	3
Tabel. 1.1.2 Daftar Sarana Prasarana Bappeda .....	4
Tabel 1.3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar .....	19
Tabel 1.3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Jangka Menengah .....	20
Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon II .....	23
Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III (Sekretaris) .....	24
Tabel 2.1.3 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III (Kabid PP Ekonomi) .....	25
Tabel 2.1.4 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III (Kabid PP Sosial dan Budaya)...	26
Tabel 2.1.5 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III (Kabid PP Fisik dan Prasarana)..	27
Tabel 2.1.6 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III (Kabid Penelitian dan Pengembangan Rinov) .....	27
Tabel 2.1.7 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) .....	28
Tabel 2.1.8 Perjanjian Kinerja 2024 Eselon IV (Kasubbag Keuangan) .....	29
Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda .....	30
Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	32
Tabel 3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 .....	33
Tabel 3.1.3 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar.....	33
Tabel 3.1.4 Realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang .....	34
Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 .....	36
Tabel 3.1.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.....	38
Tabel 3.1.7 Perbandingan Realiasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar dengan Bappenas .....	39
Tabel 3.1.8 Realisasi Program Per Indikator Kinerja.....	46
Tabel 3.1.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran.....	49
Tabel 3.1.10 Efisiensi Per Indikator Kinerja.....	51
Tabel 3.1.11 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan .....	59
Tabel 3.1.12 Realisasi Anggaran Belanja Bappeda 2024.....	61
Tabel 3.1.13 Realisasi Anggaran untuk Sekretariat dan Bidang Per Program dan Kegiatan .....	62
Tabel 3.1.14 Realisasi Anggaran per Sasaran .....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Penjelasan Umum Organisasi**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mempresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance, berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam Menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut



diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar menyusun LAKIP Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar kepada Wali Kota Pematangsiantar dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar di tahun selanjutnya.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dimaksud sebagai pedoman/acuan bagi bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kebijakan, mengelola kinerja mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, guna mengukur tingkat keberhasilan atas visi dan misi yang telah ditetapkan

dalam perencanaan strategis. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ditujukan untuk:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda kepada Walikota Pematangsiantar dan pihak berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Meningkatkan akuntabilitas Bappeda Kota Pematangsiantar.
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kredibilitas Bappeda Kota Pematangsiantar terhadap pemberi delegasi wewenang.
4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungan.
5. Untuk dapat mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

#### A. Data Umum Organisasi

##### a. Personil

Jumlah pegawai Bappeda Kota Pematangsiantar sebanyak 43 orang PNS dan 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL), total Pegawai 50 orang dengan rincian sesuai sebagai berikut :

**Tabel 1.1.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Kota Pematangsiantar Berdasarkan Pangkat, Golongan Pendidikan, Gender**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	12 25 6 0	
2	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan : a. S2, S3 b. S1 c. D3 d. SMU e. SLTP f. SD	16 20 - 14 - -	
3	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural : a. Eselon II	1	



NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV	2	
4	Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional : a. Jabatan Fungsional Perencana b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan c. Jabatan Fungsional Peneliti	15 1 -	
5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender a. Laki-laki b. Perempuan	30 20	
6	Jumlah PNS Keseluruhan	43	
7	Jumlah Tenaga Harian Lepas	7	
	Jumlah Total	50	

Sumber Data : DUK Bappeda Kota Pematangsiantar 2024

#### b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, adapun Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 di bawah ini :

**Tabel 1.1.2**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Tahun 2024**

NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	385,44 M <sup>2</sup>		385,44 M <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	38,28 M <sup>2</sup>		38,28 M <sup>2</sup>
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	38,28 M <sup>2</sup>		38,28 M <sup>2</sup>
4	Bangunan Tempat Parkir	87,87 M <sup>2</sup>		87,87 M <sup>2</sup>
5	Saluran Induk Pembuang (Bangunan	36 M		36 M



NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
	Pembuang Irigasi)			
6	Mobil	1 Unit	1	2 Unit
7	Sepeda Motor	17 Unit		17 Unit
8	Reciver		6 Unit	6 Unit
9	Global Positioning System		6 Unit	6 Unit
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		1 Unit	1 Unit
11	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2 Unit		2 Unit
12	Lemari Besi/Metal	9 Unit		9 Unit
13	Lemari Kayu	3 Unit		3 Unit
14	Rak Besi	1 Unit		1 Unit
15	Filing Cabinet Besi	34 Unit		34 Unit
16	Brandkas	1 Unit		1 Unit
17	White Board	9 Unit		9 Unit
18	Alat Penghancur Kertas	2 Unit		2 Unit
19	Mesin Absensi		1 Unit	1 Unit
20	Display	1 Unit		1 Unit
21	Alat Kantor Lainnya	6 Unit		6 Unit
22	Meja Kerja Kayu	52 Unit		52 Unit
23	Kursi Besi/Metal	132 Unit		132 Unit
24	Meja Rapat	14 Unit		14 Unit
25	Meja Bundar	5 Unit		5 Unit
26	Kursi Rapat	112 Unit		112 Unit
27	Kursi Putar	31 Unit		31 Unit
28	Kursi Biasa	5 Unit		5 Unit
29	Kursi Lipat	22 Unit		22 Unit
30	Sofa	1 Set		1 Set
31	A.C. Window	15 Unit		15 Unit
32	A.C. Split	9 Unit		9 Unit
33	Kipas Angin	7 Unit		7 Unit

NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
34	Televisi	9 Unit		9 Unit
35	Sound System	1 Unit		1 Unit
36	Wireless	2 Unit		2 Unit
37	Microphone	10 Unit		10 Unit
38	Unit Power Supply	2 Unit		2 Unit
39	Stabilisator	2 Unit		2 Unit
40	Camera Video	2 Unit		2 Unit
41	Camera Film	1 Unit		1 Unit
42	Lambang Garuda Pancasila	3 Unit		3 Unit
43	Tangga Alumunium	2 Unit		2 Unit
44	Dispenser	6 Unit		6 Unit
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II, III, IV dan Pejabat Lainnya	22 Unit		22 Unit
46	Meja Rapat Pejabat Lainnya	3 Unit		3 Unit
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II, III dan IV	15 Unit		15 Unit
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Unit		3 Unit
49	Peralatan studio audio lainnya (dst)	1 Unit		1 Unit
50	Camera Electronic	2 Unit		2 Unit
51	Camera Film	1 Unit		1 Unit
52	Layar Film/Projector	6 Unit		6 Unit
53	Video Confrence	1 Unit		1 Unit
54	Alat Studio Video Lainnya	1 Unit		1 Unit
55	Pesawat Telephone	2 Unit		2 Unit
56	Facsimile	1 Unit		1 Unit
57	Antena SHF Portable	1 Unit		1 Unit
58	Peralatan Antena SHF/Parabola lainnya (dst)	1 Unit		1 Unit
59	Bracket Holder	1 Unit		1 Unit
60	Stabilizer	2 Unit		2 Unit
61	Layar	1 Unit		1 Unit



NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
62	Pita Ukuran (Meteran)	4 Unit		4 Unit
63	P.C. Unit	7 Unit		7 Unit
64	Laptop	55 Unit	10 Unit	65 Unit
65	Tablet PC	4 Unit		4 Unit
66	Hard Disk	5 Unit		5 Unit
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 Unit		30 Unit
68	External Hardisk	8 Unit		8 Unit
69	Modem	1 Unit		1 Unit

Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bappeda Tahun 2024

### c. Landasan Hukum

LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012–2032;
  9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
  10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
  12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
  13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

## **1.2 Aspek Strategis Organisasi**

Bappeda adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintahan. Sesuai dengan Pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Undang-Undang tersebut dilakukan amandemen yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah amandemen yang kedua. Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan. Oleh sebab itu Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar diatur pada Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur pemerintahan yang meliputi perencanaan, penelitianm, dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dibantu oleh :

- I. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan Badan;
  - e. Pengoordinasian program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai terkait tugas dan fungsinya.
- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan mengagendakan surat menyurat, pendistribusian surat menyurat, pengarsipan surat menyurat, hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
  - b. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi aset di lingkungan Badan;
  - c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian dan koordinasi pembinaan pegawai di lingkungan Badan; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.
- 2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
  - b. Menyelenggarakan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan penggajian pegawai; dan

- c. Melakukan pelaporan keuangan serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Badan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.
- II. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan dan penganggaran pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program/kegiatan pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi; dan
  - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- III. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pendidikan, kesehatan dan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan serta koordinasi program/kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan; dan
  - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- IV. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program/kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;

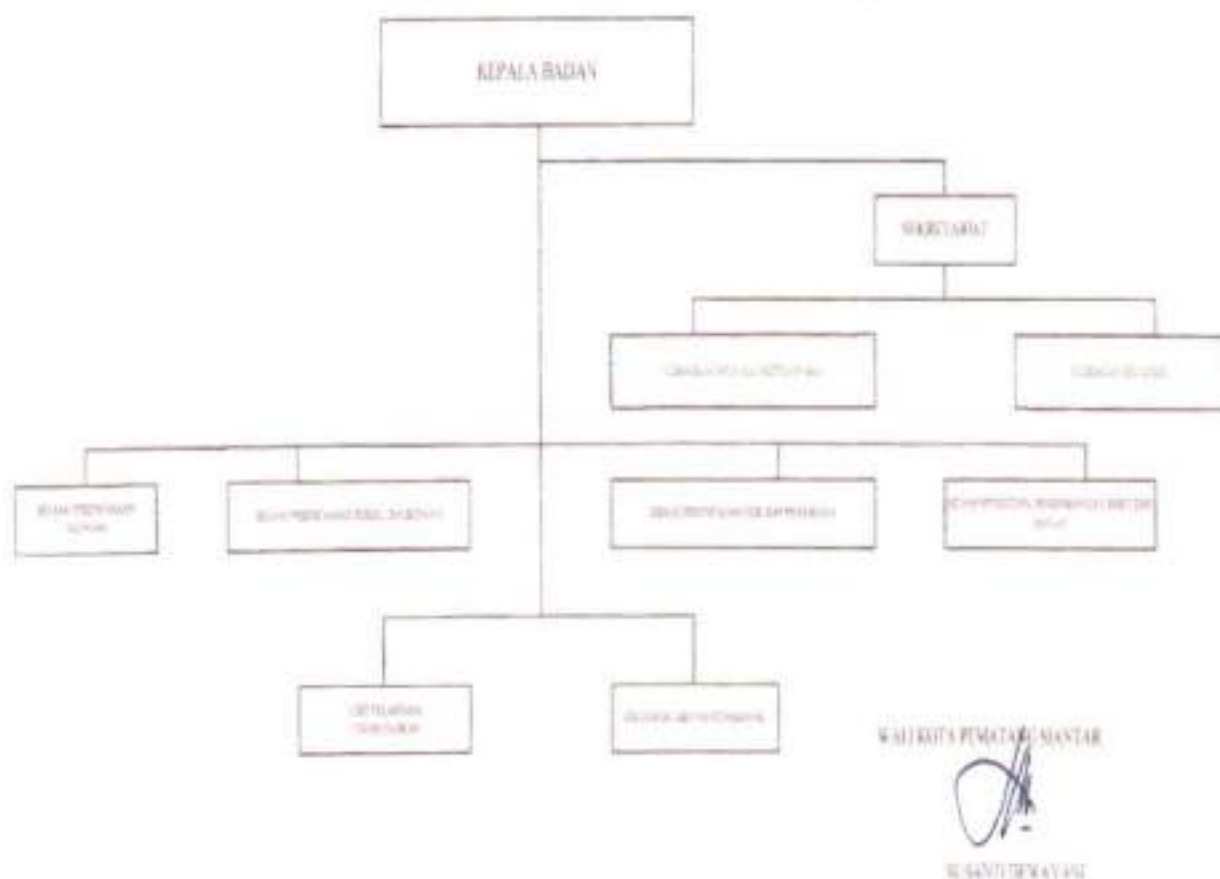


- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- V. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, pengembangan wilayah perkotaan, pengkajian dan penerpan, invensi dan inovasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Perencanaan Bidang Penelitian Pengembangan;
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan serta Invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan dan Koordinasi Penerapan Hasil Penelitaian dan Pengembangan;
  - d. Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - f. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi dan pemanfaatan riset dan inovasi;
  - g. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - h. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.



Hubungan hirarki pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional digambarkan dalam struktur organisasi dibawah ini :

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Bappeda Kota Pematangsiantar**



Sumber : Perwa No 27 Tahun 2022

### 1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategi)

#### A. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kota Pematangsiantar jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kota Pematangsiantar yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP.
- c. Keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan.
- d. Pengembangan sistem inovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan.

#### B. Rencana Strategis

Visi Pemerintah Kota Pematangsiantar Visi Kota Pematang Siantar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 adalah **"Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"**. Indikasi terwujudnya pencapaian tersebut dimaknai dengan:

- 1. Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid – 19.
- 2. Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid 19.
- 3. Berkualitas** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Upaya perwujudan Visi tersebut di atas diharapkan dapat dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan heterogenan yang berkualitas. Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar regional, perekonomian.



2. Memperkuat dan memulihkan penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau paska pandemi Covid 19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional .

4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, kebersihan dan infrastruktur, keindahan pengembangan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan urusan kewenangan yang dimiliki, Bappeda berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Pematangsiantar, yaitu sebagai instansi perencanaan pembangunan. Bappeda Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a.

Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dari ketiga sasaran RPJMD Kota Pematangsiantar diatas, Bappeda Kota Pematangsiantar mendukung sasaran kedua, meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan prosisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematangsiantar yaitu : "Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaanya sebagai Lembaga teknis bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Pematangsiantar. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah :

- Bappeda sebagai institusi yang menjalankan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 20024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda menjadi lembaga strategis yang keberadaanya menjadi lokomotif dan *tink tank*-nya pembangunan daerah.
- Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program pembangunan.
- Tingginya kapasitas warga Kota Pematangsiantar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam



forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Keberadaan Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1.3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (sesuai Perubahan Renstra)**

RPJMD	RENSTRA			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Ke 3 : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Corporate Governanace</i> .	Mewujudkan perencanaan yang akuntabel.	Nilai AKIP daerah komponen perencanaan dan pengukuran kinerja,	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan.
			Efektivitas pengendalian pembangunan daerah.	Persentase capaian pembangunan daerah.
			Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah.
				Indeks Inovasi Daerah
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh Bappeda
			Meningkatnya tata kelola	Capaian nilai Akuntabilitas



RPJMD	RENSTRA			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah.	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah.

Sumber : Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar 2022-2027

**Tabel 1.3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target**  
**Jangka Menengah Bappeda Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (Sesuai Perubahan Renstra)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal RENSTRA (2022)						Kondisi Akhir RENSTRA (2027)
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perencanaan yang akuntabel		Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	14,83	17	18	19	20	21	21
			Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	9,06	12	14	14,75	15	15,25	15,25
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan.	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Efektivitas pengendalian pembangunan daerah.	Persentase capaian pembangunan daerah.	65%	65%	90%	92%	95%	100%	100%
		Meningkatkan penerapan	Persentase hasil kajian dan	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal RENSTRA (2022)						Kondisi Akhir RENSTRA (2027)
					2023	2024	2025	2026	2027	
		penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	penelitian yang dijadikan kebijakan daerah.							
			Indeks Inovasi Daerah	-	-	35	40	45	50	50
			Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda	-	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah.	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	B	B	B	BB	BB	BB
			Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah.	75	-	80	82	85	90	90

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar 2022-2027

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Visi-Misi yang tercantum didalam RPJMD Kota pematangsiantar Tahun 2022-2027. Dibawah ini di sajikan tabel Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dan akan



mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, terlampir.

**Tabel 2.1.1**  
**Perjanjian Kinerja 2024 ESELON II**  
**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

NO.	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	4
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	BB
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	83,16
2	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	100%	96,83%
3	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	90%	85,71%
4	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	35	51,67
		Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	100%	100%
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda	1 Inovasi	1 Inovasi

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.209.006.855	6.158.435.212	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	662.879.345	639.551.711	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	310.081.162	305.180.387	
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	507.880.749	491.458.525	
TOTAL		7.689.848.111	7.594.625.835	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

**Tabel 2.1.2**  
**Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III**  
**Sekretaris**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	BB
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80	83,16
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda	1 Inovasi	1 Inovasi

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.209.006.855	6.158.435.212	
TOTAL		6.209.006.855	6.158.435.212	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon III Kota Pematangsiantar



**Tabel 2.1.3**  
**Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III**  
**Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Keselarasan Renja OPD	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra DP Bidang Perekonomian dan SDA	85	89,38
2	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD).	90%	100%

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.554.060	55.704.000	
1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.465.768	75.043.717	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			

2.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	209.275.015	207.903.451	
2.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	364.861.346	347.420.190	
TOTAL		706.156.189	686.071.358	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon III Kota Pematangsiantar

**Tabel 2.1.4**  
**Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III**  
**Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	99,19%	95,75%

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	66.753.250	64.847.160	
TOTAL		66.753.250	64.847.160	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon III Kota Pematangsiantar

**Tabel 2.1.5**  
**Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III**  
**Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	96%	95,92%

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.308.084	109.585.510	
TOTAL		111.308.084	109.585.510	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon III Kota Pematangsiantar

**Tabel 2.1.6**  
**Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III**  
**Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Riset dan Inovasi**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85%	85,71%
	a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan	100%	100%
	b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	b. Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	100%	100%



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	perencanaan perangkat daerah	Perencanaan Perangkat daerah yang dikendalikan dan di evaluasi		
2	Meningkatnya kualitas hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	70%	70%
	a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	a. Jumlah Inovasi yang diterapkan	10	11

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	88.742.984	84.228.070	
2	Program Penelitian dan Pengembangan			
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	107.880.749	98.033.025	
TOTAL		196.623.733	182.261.095	

**Tabel 2.1.7**  
**Perjanjian Kinerja 2024 Eselon IV**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	12 Laporan	12 Laporan
3	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan	12 Laporan	12 Laporan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
		pemerintahan daerah		
4	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon IV BAPPEDA Kota Pematangsiantar

**Tabel 2.1.8**  
**Perjanjian Kinerja 2024 Eselon IV**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP, LAP. TW1-4, RENJA)	9 Dokumen	9 Dokumen

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon IV BAPPEDA Kota Pematangsiantar

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Indikator Kinerja Utama Bappeda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan Dokumen Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 telah beberapa kali dilakukan perubahan melalui SK Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dibawah ini disajikan Tabel Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pematangsiantar sesuai dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 800.1.11.1/012.a/Bapp/11/2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

**Tabel 2.2.1**

**Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pematangsiantar**

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	100%	96,83%
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah.	Persentase Capaian Pembangunan Daerah.	90%	85,71
3	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	35	51,67
		Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	100%	100%
		Jumlah Inovasi yang	1	1



No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi
		dihasilkan Bappeda		
4	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	BB
		Nilai IKM Perangkat Daerah	80	83,16

Sumber : Keputusan Kepala Bappeda Nomor 024/000.8.6.3/16.a/XI-2024

### 2.3 Rencana Strategis

Untuk mendukung Terwujudnya Perencanaan Yang Akuntabel, sebagaimana tujuan Bappeda Kota Pematangsiantar pada Renstra Tahun 2022-2027, dimana untuk mencapai tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja. Sebagaimana pada Tabel 2.2.1 dimuat pada Perubahan IKU Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 yang memuat ke 4 (empat) Sasaran Strategis tersebut dan dilaksanakan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPEDA Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Pematangsiantar yang menjadi tugas BAPPEDA Kota Pematangsiantar. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu :

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

##### 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian kinerja indikator tujuan diperoleh berdasarkan indikator kinerja tujuan. Perumusan indikator tujuan lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Secara rincian capaian masing-masing indikator kinerja tujuan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	18	22,53	125,16
2	Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	14	21,94	156,71
Rata-rata Kinerja				140,93

Sumber Data: Dokumen Penilaian SAKIP Bappeda Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 2 indikator tujuan yang telah ditetapkan, keduanya memperoleh realisasi yang melampaui target dengan kriteria sangat tinggi. Pencapaian indikator tujuan yang melampaui target ini dipengaruhi beberapa faktor yang akan dijelaskan pada sub bab 3.1.5 halaman berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Bappeda Kota Pematangsiantar telah menetapkan 7 (tujuh) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Renja Bappeda Tahun 2024, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	100 %	96,83%	96,83%
2	Persentase Capaian Pembangunan Daerah.	90%	85,71%	95,23%
3	Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	147,62
4	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui kebijakan daerah	100%	100%	100%
5	Jumlah Inovasi yang di Hasilkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
6	Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (60)	BB (70,25)	117,08%



7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	83,16	103,95
Rata-rata Kinerja				108,67

Sumber Data : Evaluasi Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 3 Indikator yang melampaui target dengan kriteria sangat tinggi dan rata-rata 108,67%. Pencapaian indikator sasaran kinerja dipengaruhi beberapa faktor yang akan dijelaskan pada sub bab bab 3.1.5 halaman selanjutnya.

Selanjutnya realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.4**  
**Realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sekretariat</b>				
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	BB	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80	83,16	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	1 Inovasi	1Inovasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>Bidang Perencanaan Ekonomi</b>				
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA	90%	89,38%	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	90%	90%	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	<b>Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya</b>				
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	90%	95,75%	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4	<b>Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana</b>				
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%	95,92%	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui Kebijakan Daerah	100%	100%	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	<b>Bidang Penelitian Pengembangan, Riset dan Inovasi</b>				
	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	90%	85,71%	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
					Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sumber Data : Evaluasi Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024

### 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Dibawah ini disajikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, yaitu :

**Tabel 3.1.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2024**

NO	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	100%	96,83%	99,58%	69,5%
2	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.	90%	85,71%	85,71%	45%
3	Nilai Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	25,76	-
4	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja;	18	22,53	19,68	19,84
5	Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	14	21,94	16,35	12,75
6	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang Dijadikan Kebijakan Daerah	100%	100%	100%	52%
7	Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam APBD	17,5%	19,76%	-	25,2%
8	Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW	66,05%	57%	69%	-
10	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Evaluasi Renja dan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja yang Konsisten dari Tahun 2022 hingga 2024 yaitu :



1. Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang dijadikan Kebijakan Daerah dengan Realisasi Kinerja naik sangat signifikan dari tahun 2023 hingga 2024.
2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD yang tetap dilaksanakan dalam setiap tahapan dari Ranwal hingga Ranhir tersusunya Dokumen RKPD Indikator Kinerja yang Konsisten dari Tahun 2022 hingga 2024 yaitu Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Capaian 96,83 pada Tahun 2024 menurun dari Tahun 2023.
4. Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah yang konsisten dilaksanakan dari Tahun 2022 hingga 2024 dan mengalami Peningkatan Realisasi Kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya 85,71% tetap diangka yang sama untuk tahun 2024 yaitu 85,71%.
5. Nilai AKIP daerah Komponen Pengukuran Kinerja dengan Capaian 22,53 di Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
6. Nilai AKIP Daerah Komponen Pengukuran Kinerja dengan kenaikan signifikan 21,94 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 terhadap sasaran meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan dilakukan perubahan dengan menambah indikator kinerja dan target dari sebelumnya persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah dan nilai indeks inovasi daerah. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Dimana sebelumnya salah satu bidang yakni Bidang Monitoring dan Litbang berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi dengan tugas dan fungsi yang baru. Dengan demikian Bappeda berperan untuk mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan inovasi baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian nilai indeks inovasi daerah dapat meningkat setiap tahun.

### **3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.**

Realisasi kinerja Tahun 2024 adalah pelaksanaan kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Realisasi kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.6**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	100%	96,83%	100%	100%	100 %
2	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	90%	85,71%	92%	95%	100 %
3	Persentase Hasil Kajian yang dijadikan Kebijakan Daerah	70%	100%	75%	80%	85%
4	Nilai Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	40	45	50
5	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh Bappeda	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
6	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	BB	B	BB	BB
7	Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80	83,16	82	85	90

Sebagaimana pada table diatas, untuk Target Indikator adalah sebagaimana target yang sudah ditetapkan dala Perubahan Renstra Tahun 2022-2027. Capaian kinerja atas Tahun 2024 adalah capaian kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Kota Pematangsiantar pada tahun 2024. Sehingga pada Tahun 2025 seyogyanya target telah di perbaharui dan ditetapkan berdasarkan capaian Kinerja Tahun 2024 yakni yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025. Sebagaimana table diatas, terdapat arsiran yang berwarna . adapun penjelasan atas table yang diarsir tersebut adalah Indikator Kinerja yang tercapai pada Tahun 2024 sebanyak 5 Indikator yang tercapai dan 2 yang belum tercapai.

#### **3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target kinerja Bappenas sebagaimana yang tertuang pada Renstra



Bappenas ada kesamaan beberapa indikator sebagaimana disandingkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar dengan Beppenas**

BAPPENAS			BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR		
Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi
1.1 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	95%	98,82%	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	100%	96,83%
2.1 Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	96-100%	99,67%	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	90%	85,71%
3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Strategi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga	97-100%	99,83%	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui Kebijakan Daerah	100%	100%
3.2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan Kementerian/Lembaga a. Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	95-100%	99,71%	Indeks Inovasi Daerah	35%	51,67%
4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	88	91,78			
4.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional a. Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, Akuntabel dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM	95	97,03	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	83,16
4.3 Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	95%	100,94%			

Sumber : Renstra Bappenas 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar dengan Indikator Kinerja Bappenas yang memiliki kesamaan adalah yang diarsir dengan warna yang sama (ada sejumlah lima indikator Bappeda). Untuk tahun 2024 Bappenas dengan realisasi kinerja seperti tabel diatas, akan tetapi



secara historis dari 2020 sampai 2024 realisasi kinerja Bappenas selalu tercapai melebihi target tahunan bahkan melebihi target akhir Renstra. Dengan asumsi bahwa pada Tahun 2024 juga realisasi kinerja Bappenas tercapai melebihi target tahunan, maka jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Bappeda Pematangsiantar dapat dikatakan bahwa pencapaian Bappeda Kota Pematangsiantar sudah baik, karena juga berhasil melebihi target tahunan kecuali untuk Indikator Kinerja Keselarasan.

### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2024 Bappeda telah berhasil mencapai target kinerja untuk 5 Indikator Kinerja dan 2 belum mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan maupun perjanjian kinerja. Beberapa faktor penyebab keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **1. Meningkatnya komitmen**

Meningkatnya Komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan di Kota Pematangsiantar. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai semua program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan sangat dibutuhkan, karena tidak mungkin kegiatan bisa terlaksana apabila tidak ada anggarannya. Walaupun anggaran Bappeda tidak terlalu besar tetapi berkat perencanaan yang baik, semuanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas pada Tahun 2024. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Ketepatan dalam perencanaan program dan kegiatan;
- Kesesuaian pengalokasian anggaran dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **2. Kualitas Sumber Daya Manusi telah meningkat.**

Adanya sinergi antar bidang di Bappeda yang secara umum didukung oleh Sumber Daya Manusia yang sudah mumpuni, dengan adanya pejabat struktural yang sudah berpengalaman, demikian juga adanya pejabat fungsional tertentu hasil penyetaraan yang sudah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam perencanaan, serta ditambah lagi sudah banyak Pejabat Fungsional hasil uji kompetensi sehingga pejabat fungsional perencana di Bappeda Kota Pematangsiantar telah sesuai standar nasional

juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja. Disamping itu pola kerja dengan berdasarkan tim kerja sesuai dengan squad tim yang diatur oleh Menpan RB sangat efektif untuk meningkatkan kerja sama tim diantara para pegawai Bappeda.

### 3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pegawai Bappeda, dan ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja secara optimal antara lain:

- a. Dalam Melaksanakan Verifikasi atas usulan Dokumen Perencanaan supaya lebih memperhatikan Konsistensi Dokumen Renja terhadap Renstra untuk mengoptimalkan capaian Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan dan menjadi tolak ukur atas penetapan target dan pendanaan untuk tahun berikutnya.
- c. Koordinasi dan komunikasi baik diinternal maupun antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah lain dalam mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan terutama pada Sasaran Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah dimana Capaian Indeks Infrastruktur yang tidak mencapai target.
- d. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung inovasi dan kreativitas SDM serta mendukung penyelenggaraan sistem kerja IDW-SO kedepan.

### A. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Tahun 2022-2027 dan telah memenuhi sasaran strategisnya dengan 5 Indikator Kinerja yang telah tercapai sesuai yang telah



ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun 2024 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna bahan penyusunan perubahan Rencana Strategis lima tahun berjalan sehingga kinerja lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

#### **B. Kendala Dan Hambatan Pencapaian Kinerja**

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Bappeda komitmen untuk Penyelarasan Renstra terhadap Renja Perangkat Daerah sebagai wujud komitmen Keselarasan dalam Dokumen Perencanaan dengan target 100%.
- b. Capaian atas Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah yang terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar dimana Capaian atas Sasaran Strategis ini tidak tercapai dikarenakan capaian atas Indeks Infrastruktur 0,87 yakni dikarenakan Menurunnya kondisi mantap jalan di Kota Pematangsiantar yang semakin menurun dari tahun sebelumnya dan menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah.
- c. Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Kota Pematangsiantar terus berupaya untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi dan mendorong Perangkat Daerah untuk menghasilkan Inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah



- d. Perangkat regulasi dari Pemerintah Pusat yang masih memerlukan peningkatan sistem dimana dengan adanya kebijakan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan satu sistem perencanaan dan penganggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat, hal ini mengandung konsekuensi bagi Bappeda Kota Pematangsiantar untuk melakukan integrasi sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang telah digunakan oleh Bappeda saat ini dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Masih diperlukan banyak penyempurnaan fitur SIPD untuk mempermudah sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.

### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Bappeda Kota Pematangsiantar;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan.
3. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Bappeda dan Perangkat Daerah dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program agar target pencapaian sasaran dapat tercapai.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal, dengan menyandingkan antara capaian sasaran kinerja secara berjenjang agar terlihat adanya korelasi yang jelas terkait capaian sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan dan capaian kinerja staf.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada

termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

6. Melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
7. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bappeda Kota Pematangsiantar untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
8. Melengkapi database kelitbangan tingkat kota, dan terus mendorong inovasi yang muncul dari Perangkat Daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan mekanisme.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar khususnya di Bappeda Kota Pematangsiantar, dan dijadikan sebagai pertimbangan atau bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

#### **3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada Tahun 2024 Bappeda Kota Pematangsiantar melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan serta 29 sub kegiatan, secara keseluruhan realisasi kinerja atas Sasaran Strategis Perangkat Daerah engan capaian 108,67% dengan rata dengan realisasi keuangan sebesar 98,12 %. Pada dasarnya program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Berdasarkan capaian tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi, dimana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu ( $\geq 1$ ), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu ( $< 1$ ), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2024 adalah :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{108,67\%}{98,12} = 1,107$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar terhadap capaian realisasi anggaran sebesar  $> 1$ , artinya terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran tahun 2024 di Bappeda Kota Pematangsiantar.

Dapat dikatakan bahwa capaian realisasi keuangan terserap diangka 98,12% dengan capaian kinerja 108,67%. Adapun rincian atas realisasi terbut yakni :



**Tabel 3.1.8**  
**Realisasi Program Per Indikator Kinerja**

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1			2	7	8	9
1	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Pembnagunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	662.879.345	639.661.711	96,49
1			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	674.136.361	555.323.641	96,72
1			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	209.275.015	207.903.451	99,34
2			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	364.861.346	347.420.190	95,21
2			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.101.079	17.471.640	86,91
3			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20.101.079	17.471.640	86,91
3			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	68.641.905	66.756.430	97,25
4			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	68.641.905	66.756.430	97,25
2	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselaran Perencanaan Pembangunan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	310.081.162	305.180.387	98,41
4			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	66.753.250	64.847.160	98,41
5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	28.079.100	26.992.880	96,13
6			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.674.150	37.854.280	97,88
5			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	132.019.828	130.747.717	99,03
7			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	55.554.060	55.704.000	98,49
8			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	75.465.768	75.043.717	99,44

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1			2	7	8	9
6			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.368.084	109.585.510	98,45
9			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.872.274	56.877.250	98,28
10			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.454.250	29.220.570	99,20
11			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	23.981.560	23.487.690	97,94
3	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	607.880.749	491.458.525	98,76
7		Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	400.000.000	393.425.500	98,35
12		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000	294.635.500	98,21
13			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Perumahan	100.000.000	98.790.000	98,79
8			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	107.880.749	98.033.025	90,87
14			Diseminasi Jasa, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	50.074.917	47.356.795	94,59
15			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	57.805.832	50.656.230	87,64
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	6.259.606.855	6.158.435.212	98,38
9		Nilai Perangkat Daerah IKM	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.996.549	24.537.285	98,16
15			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.996.549	24.528.285	98,12
10			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.705.927.222	4.679.629.268	99,44
16			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.705.927.222	4.679.629.268	99,44
11			Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.146.696	984.753.516	99,55
17			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	58.832.570	58.117.621	98,78



NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1			2	7	8	9
			Bangunan Kantor			
18			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.096.710	40.258.815	97,96
19			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.433.784	22.232.570	94,87
20			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.130.432	40.721.340	99
21			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.640.000	28.549.170	96,31
22			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795.013.200	794.874.000	99,98
12			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>415.046.388</b>	<b>348.557.753</b>	<b>83,98</b>
23			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.866.388	76.841.753	73,27
24			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.780.000	271.716.000	87,43
13			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>100</b>
25			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	38.000.000	100
14			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.896.000</b>	<b>82.957.390</b>	<b>96,58</b>
27			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.870.000	63.797.390	98,04
28			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.020.000	29.160.000	94
				<b>7.740.448.111</b>	<b>7.594.525.835</b>	<b>98,12</b>



**Tabel 3.1.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselaran Perencanaan Pembangunan	100%	96,83%	96,83%	310.081.162	305.180.387	98,41%
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	90%	85,71%	95,23%	662.879.345	639.551.711	96,48%
3	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam	Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	147,62%	507.880.749	491.458.525	96,76%

	pembangunan							
		Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui Kebijakan Daerah	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	-	-	-
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	BB	117,08%	6.259.606.855	6.158.435.212	98,38
		Nilai IKM	80	83,16	103,95%	-	-	-

		Perangkat Daerah						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

**Tabel 3.1.10**  
**Efisiensi Per Indikator Kinerja**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselaran Perencanaan Pembangunan	96,83%	98,41%	0,98 (Tidak ada Efisiensi)
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	85,71%	96,48%	0,98 (Tidak ada Efisiensi)
3	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	147,62%	90,87%	1,62
		Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang	100%	98,35%	1,016



		diterapkan melalui Kebijakan Daerah			
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	100%	-	-
4	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah	117,08%	98,38%	1,190
		Nilai IKM Perangkat Daerah	103,95%	-	-

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut analisis Program/Kegiatan yang menjadi Faktor tidak tercapainya kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **a. Sasaran pertama yaitu "Keselarasan perencanaan pembangunan daerah" yang diukur dengan indikator kinerja "Persentase keselarasan perencanaan pembangunan".**

Sasaran ini menggambarkan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan yang ada (RPJMD dengan Renstra, RKPD dengan Renja) serta keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah (pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dengan pemerintah pusat). Semakin tinggi persentase keselarasan perencanaan pembangunan, maka akan semakin baik kualitas dokumen perencanaan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan teknis penilaian kualitas dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk capaian Tahun 2024, kinerja pada sasaran ini target 100% dan terealisasi 97,5% dengan capaian 97,5%. Kinerja ini didukung melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Anggaran Rp. 310.081.162 dengan realisasi anggaran Rp. 305.180.387 dengan persentase realisasi anggaran 98,41%. Adapun faktor yang menyebabkan capaian indikator persentase keselarasan perencanaan pembangunan adalah kurangnya komitmen atas konsistensi Perencanaan yang telah disepakati pada dokumen Renstra untuk diterapkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Upaya untuk menghindari dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi para ASN di Bappeda khususnya para pejabat fungsional perencana dan PIC Perangkat Daerah pada Bappeda.
- b. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para perangkat daerah dan pemerintah atasan terkait sinkronisasi dan sinergitas perencanaan.

- c. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada.
- b. **Sasaran kedua yaitu "Efektivitas pengendalian pembangunan daerah" yang diukur dengan indikator kinerja "Persentase capaian pembangunan daerah".**

Sasaran ini menggambarkan keberhasilan fungsi Bappeda dalam merealisasikan capaian pembangunan daerah, khususnya yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Melalui pengendalian pembangunan yang dilakukan secara berkala, diharapkan capaian pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai rencana atau bahkan jika memungkinkan lebih cepat. Semakin tinggi persentase capaian pembangunan yang tercapai, maka fungsi pengendalian pembangunan dinilai semakin berhasil. Capaian pembangunan merupakan dasar dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Untuk Tahun 2024 dari target 90 % terealisasi sebesar 85,71% dengan persentase capaian 95,23%. Kinerja ini didukung melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp. 662.879.345 dan realisasi anggaran Rp 639.551.711 dengan Persentase serapan anggaran 96,48. Perlu dijelaskan dalam pencapaian Target Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yakni :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RKPD TAHUN 2024	REALISASI	KETERAN GAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,13 – 80,61	81,17	*Data Sementar a
Persentase tingkat kemiskinan	%	7,88-7,69	7,20	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,36 – 8,57	8,00	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,47 – 4,54	4,61	
Indeks Gini	Indeks	0,311	0,2970	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (50-61)	B (64,5)*	
Indeks Infrastruktur	Indeks	0,89	0,87	



Menurut tabel diatas, dari 7 indikator maka 6 indikator telah mencapai target yang ditentukan. Kecuali untuk Indeks Infrastruktur yang tidak memenuhi target dikarenakan Kondisi Mantap Jalan yang menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2024.

Untuk mengatasi permasalahan di atas pada masa yang akan datang, akan dilakukan beberapa hal, yaitu :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah atau instansi yang membidangi masing-masing indikator
- 2) Meningkatkan pengendalian capaian pembangunan melalui desk setiap triwulan.
- 3) Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
- 4) Menyusun Laporan Capaian atas Indikator dengan tepat waktu sehingga data dapat dimanfaatkan dengan tepat waktu terutama meningkatkan koordinasi dengan BPS Kota Pematangsiantar.

**c. Sasaran ketiga yaitu "Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan" yang diukur dengan indikator kinerja "Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Hasil Kajian yang diterapkan".**

Sasaran ini merupakan gambaran dari fungsi penelitian dan pengembangan yang melekat pada Bappeda Kota Pematang Siantar. Melalui capaian indikator kinerja pada sasaran ini diharapkan bahwa Bidang Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar mendorong semua Perangkat Daerah untuk menghasilkan minimal 1 inovasi setiap tahunnya sehingga nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat. Semakin tinggi nilai indeks inovasi, tentunya menggambarkan semakin banyak inovasi yang dihasilkan dalam pelayanan masyarakat maupun dalam kemudahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Untuk tahun 2024, dari target Indeks Inovasi adalah 35 dan Realiasi 51,76 dengan capaian Kinerja atas Indeks Inovasi adalah 147,88%. Capaian ini menjadikan Kota Pematangsiantar menjadi salah satu Kota yang Inovatif di Indonesia. Kinerja ini didukung melalui PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan Anggaran sebesar Rp. 507.880.749 dengan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 491.458.525 dengan capaian

kinerja keuangan sebesar 96,76%.

Jika melihat dari target dan realisasi, capaian kinerja nilai indeks inovasi daerah sudah termasuk kriteria sangat tinggi dengan Predikat Indeks Inovasi Daerah "Inovatif". Kedepan Bappeda Kota Pematangsiantar menargetkan target yang lebih tinggi menjadi Kota "Sangat Inovatif" dengan Nilai Indeks 60. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan target kinerja sasaran ini adalah:

- a. Perangkat Daerah di Kota Pematangsiantar sudah semakin antusias untuk memberikan ide-ide, gagasan dan Inovasi yang bermanfaat untuk menunjang Kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar serta bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Pematangsiantar.
- b. Inovasi yang digagas sudah terintegrasi dan bernilai baik

Untuk meningkatkan Nilai Indeks Inovasi di masa yang akan datang, akan dilakukan beberapa hal, yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta maupun masyarakat yang memiliki ide dan gagasan untuk berinovasi dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar
- 2) Memberikan Reward atas Inovasi yang bermanfaat untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dan bermanfaat bagi masyarakat
- 3) Menggerakkan seluruh Stakeholder dan masyarakat untuk semakin giat berinovasi lewat Sosialisasi dan perlombaan.
- 4) Mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah.

Pada Tahun 2024 Pemanfaatan Hasil Kajian yaitu dengan target kinerja 100% dan Realisasi Kinerja adalah 100%, dimana kajian yang disusun oleh Bappeda Kota Pematangsiantar terdiri dari 2 (dua) kajian yaitu Kajian Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai anggaran 300.000.000 dan Kajian Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 100.000.000. Capaian kinerja atas kedua kajian ini adalah 100% yang artinya ke dua dokumen telah selesai disusun dan telah disampaikan kepada OPD Teknis sebagai Perangkat Daerah yang akan melanjutkan penerapan kajian tersebut.

- d. Sasaran keempat yaitu **"Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah"** yang diukur dengan indikator kinerja **"Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"**



## **Perangkat".**

Pada perjanjian kinerja tahun 2024 sasaran ini merupakan sasaran pendukung dalam pencapaian sasaran kinerja strategis Bappeda sebagaimana tercantum pada Renstra Perangkat Daerah 2022-2027. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan menjadi penting dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda karena jika tata kelola dan pelayanan administrasi tidak baik, maka dapat berpengaruh pada pencapaian sasaran strategis. Semakin tinggi capaian nilai AKIP perangkat daerah, maka semakin baik tata kelola penyelenggaraan urusan di Bappeda.

Untuk tahun 2024, target nilai AKIP Bappeda adalah "B" dan capaian adalah "BB" dengan capaian 117,08% dari target. Kinerja ini didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.259.606.855 dan realisasi sebesar Rp 6.158.435.212 dengan capaian realisasi keuangan 98,38%.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

- 1) Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 22,35 dimana Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan nilai 5,40 dalam artian telah memenuhi standar yang baik yaitu mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART antara keselarasan Cascading setiap level secara logis serta memperhatikan Coscutting dengan nilai 6,63 dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan nilai 10,50.
- 2) Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,94 dengan komponen pengukuran kinerja 4,20 dan sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara berjenjang dengan nilai 6,94 serta pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment dengan nilai 10,80.
- 3) Pelaporan kinerja memperoleh nilai 10,33 dengan komponen Dokumen Pelaporan menggambarkan kinerja dengan nilai 2,35, Dokumen laporan telah memenuhi Standar kulaitas dan pencapaian kinerja yang memuat informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya untuk perbaikan dengan nilai 3,05 dan pelaporan kinerja memberikan dampak besar penyesuaian strategi/kebijakan dengan nilai 4,93
- 4) Evaluasi AKIP Internal memperoleh 15,45 dengan komponen Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan nilai 3,50, Evaluasi AKIP internal dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dengan nilai 4,20 dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya



dan memberikan kesan dan dampak yang nyata dan dengan Nilai 7,75

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana disebutkan diatas dapat disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.1.11

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd 2024	Realisasi Sampai 2024	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	100%	97,5%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	310.081.162	305.180.387	98,41
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	66.753.250	64.847.160	97,14
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	132.019.828	130.747.717	99,03
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.308.084	109.585.510	98,45
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian Pembangunan daerah	90%	85,71%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	662.879.345	639.551.711	96,48
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	574.136.361	555.323.641	96,72
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.101.079	17.471.640	86,91
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	68.641.905	66.756.430	97,25
3	Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan ngunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	507.890.749	491.458.525	96,76
					Penelitian dan Pengembang-an Bidang Ekonomi dan	400.000.000	393.425.500	98,35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd 2024	Realisasi Sampai 2024	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pembangunan			
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	107.880.749	98.033.025	90,87
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B (>60-70)	BB (>70-80)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	6.259.606.855	6.158.435.212	98,38
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.996.549	24.537.285	98,16
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.705.927.222	4.679.629.268	99,44
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.146.696	984.753.516	99,55
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.046.388	348.557.753	83,98
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	38.000.000	100
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.890.000	82.957.390	96,58
Jumlah						7.740.448.111	7.594.625.835	98,12



### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 7.740.448.111 atau dengan nilai persentase realisasi keuangan sebesar 98,12% dengan rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp 7.702.448.111 dengan presentase realisasi keuangan 98,10% dan realisasi Belanja Modal Rp 38.000.000 dengan presentase sebesar 100. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.12**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5	BELANJA DAERAH	7.740.448.111	7.594.625.835	98,12	7.768.139.152
5.1	BELANJA OPERASI	7.702.448.111	7.556.625.835	98,10	7.069.141.854
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.702.448.111	7.556.625.835	98,10	7.069.141.854
5.2	BELANJA MODAL	38.000.000	38.000.000	100%	698.997.298
	JUMLAH BELANJA MODAL	38.000.000	38.000.000	100%	698.997.298
	JUMLAH BELANJA	7.740.448.111	7.594.625.835	98,12%	7.768.139.152

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Selanjutnya realisasi anggaran untuk Sekretariat dan Bidang dapat dirinci per program dan kegiatan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.13**  
**Realisasi Anggaran Untuk Sekretariat dan Bidang Per Program dan Kegiatan**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	6	7	8	9
1	Sekretariat		6.259.606.865	6.158.435.212	98,38
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>	6.259.606.865	6.158.435.212	98,38
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.996.549	24.537.285	98,16
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.705.927.222	4.679.629.268	99,44
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.146.969	984.753.516	99,55
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.046.388	348.557.753	83,96
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	38.000.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.890.000	82.957.390	96,58
2	Bidang Perencanaan Ekonomi		706.156.189	686.071.358	97,15
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	132.019.628	130.747.717	99,77
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	132.019.628	130.747.717	99,03
		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	574.136.361	555.323.641	96,72
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	574.136.361	555.323.641	96,72
3	Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya		66.753.250	66.793.250	97,14
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	66.753.250	64.847.160	97,14
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	66.753.250	64.847.160	97,14
4	Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana		511.308.084	503.011.010	98,37
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	111.308.084	109.585.510	98,45
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.308.084	109.585.510	98,45
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	400.000.000	393.425.500	98,35
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	400.000.000	393.425.500	98,35
5	Bidang Penelitian Pengembangan, Riset dan Inovasi		196.623.733	182.261.095	92,69
		<b>PROGRAM PERENCANAAN</b>	88.742.984	84.228.070	94,91

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	6	7	8	9
		<b>PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.101.079	17.471.640	86,91
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	68.641.905	66.756.430	97,25
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>107.880.749</b>	<b>98.033.025</b>	<b>90,87</b>
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	107.880.749	98.033.025	90,87
<b>Jumlah</b>			<b>7.740.448.111</b>	<b>7.594.625.835</b>	<b>98,12</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024

**Tabel 3.1.14**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselaran perencanaan pembangunan	100%	97,5%	310.081.162	305.180.387	98,41
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian Pembangunan daerah	90%	85,71%	662.879.345	639.551.711	96,48
3	Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan ngunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	35	51,67	107.880.749	98.033.025	90,87
		Persentase hasil kajian dan penelitian yang diterapkan melalui kebijakan daerah	100%	100%	400.000.000	393.425.000	98,35
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	BB	6.259.606.855	6.158.435.212	98,38
<b>Jumlah</b>					<b>7.740.448.111</b>	<b>7.594.625.835</b>	<b>98,12</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **4.1. Saran dan Rekomendasi**

##### **4.1.1. Saran**

Bappeda Kota Pematangsiantar telah melaksanakan Kinerja selama Tahun 2024 dimana sesuai dengan Target yang telah diperjanjikan di Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah mencapai Target dan 2 (dua) yang tidak mencapai target. Faktor pendorong dan faktor penghambat atas capaian ini telah diulas pada bab sebelumnya.

Untuk meningkatkan kinerja pada Bappeda Kota Pematangsiantar, dimana untuk pencapaian kinerja tersebut tidak didapatkan semata mata oleh hanya Bappeda saja. Tetapi keberhasilan ini adalah didukung oleh Perangkat Daerah maupun Instansi lainnya yang memegang peranan atas capaian kinerja ini. Salah satu faktor penunjang atas keberhasilan kinerja ini adalah tidak lepas dari Perangkat Daerah yang bersifat teknis untuk melaksanakan peningkatan pelayanan di Kota Pematangsiantar.

Untuk keberhasilan di tahun mendatang perlu perbaikan atas ketersediaan data pada Perangkat Daerah dan aktif dalam rangka berkoordinasi atas ketersediaan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar yang secara keseluruhan adalah mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar.

#### **4.1.2 Rekomendasi**

Diharapkan perhatian terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kota Pematangsiantar yakni melalui adanya Diklat. Dengan adanya Diklat dan Pelatihan yang bersifat khusus untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kota Pematangsiantar yang mendukung untuk Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas sehingga pelaksanaan Kinerja dapat terlaksana dengan lebih optimal pada Bappeda Kota Pematangsiantar. Dimana harus kita pahami bersama bahwa keberhasilan Bappeda itu adalah merupakan bagian besar daripada keberhasilan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Seluruh Instansi di Kota Pematangsiantar. Dengan tujuan semakin meningkatkan pelayanan yang baik di Kota Pematangsiantar.

Demikian Laporan Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024 disusun, semoga dapat memberikan informasi maupun parameter peningkatan kinerja aparatur Bappeda ditahun yang akan datang.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR,



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19811130 200312 1 003

## LAMPIRAN

- 4.1.1.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 4.1.1.2. Perubahan Indikator Kinerja Utama
- 4.1.1.3. Eviden Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.
- 4.1.1.4. Eviden Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.
- 4.1.1.5. Eviden Nilai Indeks Inovasi Daerah
- 4.1.1.6. Eviden Hasil Kajian
- 4.1.1.7. Eviden Inovasi yang dihasilkan Bappeda
- 4.1.1.8. Eviden Capaian Nilai AKIP
- 4.1.1.9. Eviden IKM





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si**

**Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

**Jabatan : Wali Kota Pematangsiantar**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pematangsiantar, 10 Februari 2024

Pihak Kedua

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,**

**dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

Pihak Pertama

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	8 80
2	Meningkatnya keselarasan perencanaan Pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan Pembangunan	100%
3	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah Indeks Inovasi Daerah	90% 35
4	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan Kebijakan daerah Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda	100% 1 Inovasi

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	662.879.345	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	310.081.162	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	507.880.749	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	6.209.006.855	
<b>TOTAL</b>		<b>7.689.848.111</b>	

Pematangsiantar, 20 Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,**

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP,M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA.

SEKRETARIS BAPPEDA.

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP,M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
NIP. 19811020 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat daerah	B
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	80
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda	1 Inovasi

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	6.209.006.855	
TOTAL		6.209.006.855	

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA,

SEKRETARIS BAPPEDA,



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M. Si  
NIP. 19811130 200312 1 003



RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
NIP. 19811020 200012 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIKI ZULIANSYAH, SAB, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

Kepala Bappeda  
Kota Pematangsiantar

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan  
Prasarana

VIKI ZULIANSYAH, SAB, MM  
NIP. 19850723 200502 1 001

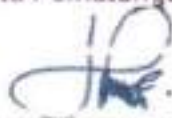
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dysperptas Koordinasi dan Renstra OPD terhadap Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.308.084	
	<b>TOTAL</b>	111.308.084	

Kepala Bappeda  
Kota Pematangsiantar



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan

Prasarana



VIKI ZULIANSYAH, SAB, MM  
NIP. 19850723 200502 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

Kepala Bappeda  
Kota Pematangsiantar

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

Kepala Bidang Perencanaan Sosial  
dan Budaya

YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP  
NIP. 19730730 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD <b>bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	99,19%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	66.753.250	
<b>TOTAL</b>		66.753.250	

Kepala Bappeda  
Kota Pematangsiantar



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

Pematangsiantar, 23 Januari 2024  
Kepala Bidang Perencanaan Sosial  
dan Budaya



YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP  
NIP. 19730730 199803 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NITA SILITONGA, SH

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bappeda,

DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

Pematangsiantar, 27 Januari 2024

Kabid Penelitian, Pengembangan,  
Riset dan Inovasi,

NITA SILITONGA, SH  
NIP. 19660607 199312 2 001



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

## BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian Pembangunan Daerah	85 %
a.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan	100 %
b.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan perangkat daerah	b. Persentase dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	100 %
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	70 %
a.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	c. Jumlah Inovasi yang diterapkan	10

	Diseminasi Jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
--	--

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	145.149.713	
2.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	34.835.822	
c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	34.835.822	
	1) Diseminasi Jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	34.835.822	

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

Kepala Bappeda,



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si  
NIP. 19811130 200312 1 003

Kepala Bidang Penelitian,  
Pengembangan, Riset dan Inovasi



NITA SULITONGA, SH  
NIP. 19660607 199312 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROLAN PANGGABEAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si**  
NIP. 19811130 200312 1 003

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
EKONOMI**

**ROLAN PANGGABEAN, SE**  
NIP. 19771208 200611 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Renja OPD	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA	85%
2	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	90%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.554.060	
1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.465.760	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
2.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	209.275.015	
2.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	364.861.346	
<b>TOTAL</b>		<b>706.156.189</b>	

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si**  
**NIP. 19811130 200312 1 003**

Pematang Siantar, 23 Januari 2024

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
EKONOMI**



**ROLAN PANGGABEAN, SE**  
**NIP. 19771208 200611 1 001**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA DAULAY, SE  
Jabatan : Kasubbag Keuangan Bappeda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

SEKRETARIS BAPPEDA,

KASUBBAG KEUANGAN

RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
NIP. 19811020 200012 1 001

KURNIA DAULAY, SE  
NIP. 19671009 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	15 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (LKPD, LKPD, LPPD, LAKIP, LAPORAN TW 1-4, RENJA)	9 Dokumen

NO.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.705.927.222	
TOTAL		4.705.927.222	


Pematangsiantar, 23 Januari 2024

SEKRETARIS BAPPEDA,

KASUBBAG KEUANGAN



RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
NIP. 19811020 200012 1 001



KURNIA DAULAY, SE  
NIP. 19671009 200801 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNIAR EVALINDA TAMPUBOLON  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 23 Januari 2024

SEKRETARIS BAPPEDA,

KASUBBAG UMUM DAN  
KEPEGAWATAN

  
RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc  
NIP. 19811020 200012 1 001

  
JUNIAR EVALINDA TAMPUBOLON, ST.  
MM  
NIP. 19760617 200502 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%
2	Terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	12 Laporan
3	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan
4	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 4 Pematang Siantar, Telepon: (0622) 27919, Kode Pos. 21122,  
E-mail: bappeda@mail.pematangsiantar.go.id, Website: bappeda.pematangsiantar.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR**

NOMOR : 024/000.8-6-3/16.a/x1-2024

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN**  
**PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA**  
**PEMATANGSIANTAR**

**KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Pematangsiantarsiantar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negeri RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Bappeda Kota Pematangsiantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pematangsiantar 2022-2027.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal : 25 November 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19811130 200312 1 003

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Uraian/Defenisi Operasional	Formula Penghitungan	Sumber Data	Ket
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Keselarasn antar dokumen perencanaan menunjukkan konsistensi dan komitmen yang kuat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	<p>Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan :</p> <p>1. Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD  <math display="block">(Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4 + Ki5 + Ki6) / 6</math>                     (Keselarasan Sasaran, Indikator, Target Sasaran, Program, Indikator Program, Target Program)</p> <p>2. Persentase Keselarasan Renja PD Terhadap Renstra Perangkat Daerah                      (Keselarasan Kegiatan Renja Terhadap Renstra)S  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada PD yang selaras dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah seluruh Kegiatan dan sub kegiatan pada Renja PD}} \times 100\%</math></p> <p>Total Capaian :</p>	Laporan Evaluasi	



				<p>Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD</p> <p>+ Persentase Keselarasan Renja PD Terhadap Rencana Perangkat Daerah</p> <p>2</p>		
2	Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan dari proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi	<p>Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai</p> $\frac{\text{X}}{100\%}$ <p>Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Skor Total</p> $\frac{\text{X}}{100\%}$ <p>Skor Total maksimum</p>	Laporan Evaluasi	
3	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	<p>Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)</p> <p>Skor Total maksimum adalah 250</p> <p>Skala 11) adalah 0 s.d 100</p>	Kemendagri	

				<p>Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD</p> <p>+ Persentase Keselarasan Renja PD Terhadap Rencana Perangkat Daerah</p> <p>2</p>		
2	Efektivitas Pengerahan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan dari proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi	<p>Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai</p> <p>100%</p> <p>Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Skor Total</p> <p>100%</p> <p>Skor Total maksimum</p> <p>Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)</p> <p>Skor Total maksimum adalah 250</p> <p>Skala HD adalah 0 s.d 100</p>	Laporan Evaluasi	
3	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	<p>Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>		Kemendagri	

	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang dijadikan Kebijakan Daerah	Kajian yang dihasilkan Oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dijadikan sebagai Dasar Kebijakan Daerah	Jumlah Hasil Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah 100% Jumlah Kajian/ Penelitian yang dihasilkan - Kajian yang diterbitkan tahun sebelumnya yang telah dimanfaatkan Jumlah yang dihasilkan oleh Bappeda	Laporan Evaluasi
4	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Mendukung Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Permenpan RB RI Nomor 88 Tahun 2021)	Inovasi yang dihasilkan Oleh Bappeda	Laporan Evaluasi
	Nilai IKM Perangkat Daerah	Mendukung (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Penilaian Inspektorat
			Skor Penilaian Pelayanan pada Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19811130 200312 1 003



**CAPAIAN ATAS MENINGKATKATNYA KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian
I	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Keselarasas Sasaran, Program, Indikator, Target Sasaran, Program, Indikator Program, target Program	100%
	Keselarasas Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD terhadap Renstra PD	95,75
2	Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	
	Keselarasas Sasaran, Program, Indikator, Target Sasaran, Program, Indikator Program, target Program	100%
	Keselarasas Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD terhadap Renstra PD	93%
3	Koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Keselarasas Sasaran, Program, Indikator, Target Sasaran, Program, Indikator Program, target Program	100%
	Keselarasas Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD terhadap Renstra PD	95,92
II	Total Keselarasas Sasaran, Program, Indikator, Target Sasaran, Program, Indikator Program, target Program	100%
III	Total Keselarasas Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD terhadap Renstra PD	64,20
IV	Total Keselarasas Dokumen Perencanaan	96,83

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR

  
**DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si**  
 NIP. 198111302003121003

**PERSENTASE KESELARASAN RENJA OPD TERHADAP RENSTRA PD BIDANG**  
**PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024**

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2025			RKPD Perubahan 2024		
		Sub Kegiatan Selaras	Jumlah Sub Kegiatan di	Persentase Keselarasan	Sub Kegiatan Selaras	Jumlah Sub Kegiatan di	Persentase Keselarasan
1	Dinas Kesehatan	95	97	97,94	91	103	88,35
2	Dinas PPKB	47	47	100,00	31	36	86,11
3	Disdukcapil	33	33	100,00	24	24	100,00
4	RSUD	10	10	100,00	8	14	57,14
5	Setdako	57	57	100,00	56	56	100,00
6	Dinas Pendidikan	87	90	96,67	63	69	91,30
7	Dinas Sosial P3A	47	47	100,00	42	42	100,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33	33	100,00	22	22	100,00
9	BPKSDM	25	26	96,15	23	23	100,00
10	Sekretariat DPRD	64	64	100,00	89	89	100,00
11	Inspektorat	44	44	100,00	44	44	100,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42	42	100,00	26	27	96,30
13	Satuan Polisi Pamong Praja	40	46	86,96	22	23	95,65
14	Bappeda	59	60	98,33	57	63	90,48
15	Kecamatan Siantar Utara	26	26	100,00	28	28	100,00
16	Kecamatan Siantar Selatan	28	35	80,00	31	32	96,88
17	Kecamatan Siantar Timur	27	27	100,00	28	28	100,00
18	Kecamatan Siantar Barat	28	28	100,00	30	34	88,24

19.	Kecamatan Siantar Martoba	22	22	100,00	25	25	100,00
20.	Kecamatan Siantar Sitalasan	23	23	100,00	25	28	89,29
21.	Kecamatan Siantar Marimbun	27	27	100,00	28	28	100,00
22.	Kecamatan Siantar Marihat	20	22	90,91	19	22	86,36
TOTAL				97,59			93,91
CAPAIAN TAHUN 2024						95,75	

KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
 BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA



YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP  
 NIP. 19730730 199803 2 003



**PERSENTASE KESELARASAN RENJA OPD TERHADAP RENSTRA PD  
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA**

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2025			PRKPD 2024		
		Sub Kegiatan Selaras	Jumlah Sub Kegiatan di Renja	Persentase Keselarasan	Sub Kegiatan Selaras	Jumlah Sub Kegiatan di Renja	Persentase Keselarasan
1	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR	17	17	100%	17	17	100%
2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR	23	24	96%	26	26	100%
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR	65	67	97%	52	53	98%
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR	20	28	71%	16	16	100%
5	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	18	25	72%	27	34	79%
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	59	59	100%	59	59	100%
Total				536%			578%
Persentase				89%			96%
Capaian							93%

KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

  
Ronan Panggabean, SE  
NIP. 19771208 200611 1 001

PERSENTASE KESELARASAN RENJAL OPD TERHADAP RENSTRA PD  
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN  
 DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2025				PRKPD 2024		
		Sub Kegiatan Selaras	Jumlah Sub Kegiatan di Renja	Persentase Keselarasan	Sub Kegiatan Selaras	Jumlah Sub Kegiatan di Renja	Persentase Keselarasan	
1	BPBD	39	39	100,00	27	29	93,10	
2	PRKP	32	32	100,00	22	22	100,00	
3	PUTR	34	37	91,89	48	48	100,00	
4	DISHUB	46	46	100,00	28	28	100,00	
5	DLH	13	16	81,25	24	28	85,71	
6	KOMINFO	70	77	90,91	28	28	100,00	
7	DAMKAR	35	35	100,00	35	35	100,00	
	TOTAL			664,05			678,82	
	PERSENTASE (%)			94,86			95,97	
	CAPAIAN TAHUN 2024						95,92	

KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
 FISIK DAN PRASARANA

  
 VIKI ZULNARAYATI, SAg, MM  
 NIP. 19850723 200502 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RKPD TAHUN 2024	REALISASI	KETERANGAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,13 – 80,61	81,17	
Persentase tingkat kemiskinan	%	7,88-7,69	7,20	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,36 – 8,57	8,00	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,47 – 4,54	4,61	
Indeks Gini	Indeks	0,311	0,379*	Indeks Gini dan Indeks Reformasi Birokrasi Belum Publish
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (50-61)	B (64,5)*	
Indeks Infrastruktur	Indeks	0,89	0,87	

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR







## LAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH (IID)

### KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2024



56	Kota Bitung	51,76	Inovatif
57	Kota Pematang Siantar	51,67	Inovatif
58	Kota Kediri	51,52	Inovatif

Rekapitulasi Total


Pemerintah Daerah Sangat Inovatif	= 112 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Inovatif	= 308 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kurang Inovatif	= 109 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai	= 17 Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

  
Asriyati A.P.M.S.  
Perwakilan Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19941015 199311 1 003

**Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah**

<b>No</b>	<b>Nama Kajian</b>	<b>OPD Yang Menerapkan</b>
1	Penyusunan Dokumen Identifikasi Perumahan Di Kota Pematangsiantar	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pematangsiantar
2	Penyusunan Dokumen Penguatan Tata Kelola Sampah Terpadu Berdasarkan 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar
3	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM) Kota Pematangsiantar	PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar
4	Penyusunan Dokumen Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematangsiantar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR

  
 Kepala  
 DEDINDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 198411130 200312 1 003





BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

## LAPORAN AKHIR

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN PENGUATAN TATA  
KELOLA SAMPAH TERPADU BERDASARKAN 5R  
(REDUCE, REUSE, RECYCLE, REPLACE, REPLANT)



CV. SARASMAS  
ENGINEERING CONSULTANT

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR



LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Induk Sistem  
Pengembangan Air Minum (RISPAM)  
Kota Pematangsiantar



Tahun 2024



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PEMANTAUAN KUALITAS PT. SUMBER KARYA JAYA PONTIAN

# LAPORAN AKHIR

BELANJA JASA  
KONSULTANSI PERENCANAAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN  
IDENTIFIKASI PERUMAHAN  
DI KOTA PEMATANG SIANTAR

2024

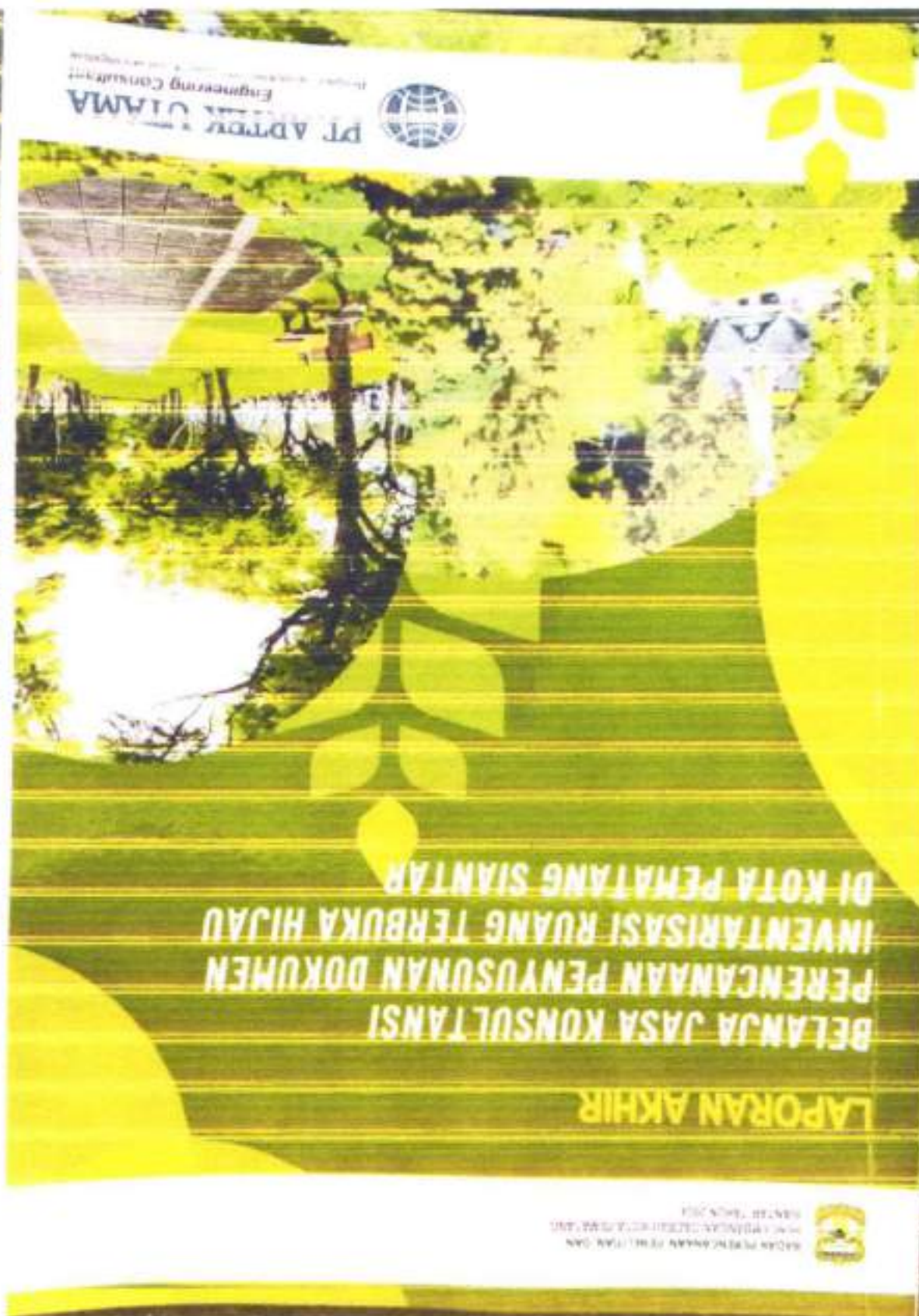


**PT. ARTEK UTAMA**

Engineering Consultant

Planning, Design, Construction & Maintenance





PT ADTEK UTAMA  
Engineering Consultant



**LAPORAN AKHIR**  
**BELANJA JASA KONSULTANSI**  
**PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN**  
**INVENTARISASI RUANG TERBUKA HIJAU**  
**DI KOTA PEMATANG SIANTAR**

KABUPATEN PEMATANG SIANTAR  
JALAN KEMERDEKAAN NO. 100  
SIANTAR, TAPANULI





LALUNCHING INOVASI  
KLIPERNOV



PEMANFAATAN  
INOVASI KLIPERNOV





**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Siatas Barita No. 33 Pematangsiantar  
Email : [Inspektoratpematangsiantar@gmail.com](mailto:Inspektoratpematangsiantar@gmail.com)

Pematangsiantar, 6 Juni 2024

Nomor : 005 / 700.1.2.1 / 1452 / VI - 2024

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

di-

Pematangsiantar

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

**I. Pendahuluan**

**A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;



7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024.
8. Surat Perintah Tugas Nomor : 005/700.1/0888/IV/2024 tanggal 05 April 2024 untuk melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Dinas PUTR, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Arsip dan Perpustakaan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Tahun 2024.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dan mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **C. Tujuan Evaluasi**

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

1. Penilaian Perencanaan Kinerja;
2. Penilaian Pengukuran Kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja, dan
4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4

## **E. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## **F. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

### **1. Dasar Hukum Pembentukan**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar dibentuk berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

### **2. Kedudukan**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **3. Tugas dan Fungsi**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan Kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2

#### G. Tindak lanjut Hasil Evaluasi sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 3 (tiga) saran/rekomendasi yang belum ditindak lanjuti sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dapat dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Belum dilaksanakan
2	Menyusun kebijakan pemberian reward and punishment untuk mendukung terciptanya budaya kerja dan mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja tercapai dengan baik.	Belum dilaksanakan
3	Menyusun LAKIP secara berkala dan memastikan informasi capaian kinerja berkala, hambatan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja disajikan secara memadai untuk dapat dipergunakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Belum dilaksanakan

## II. Gambaran Hasil Evaluasi SAKIP

### A. Kondisi Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang selanjutnya diberikan "kategori" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 tersebut diperoleh nilai sebesar **70,25** dengan kategori **BB**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 22,53 yang terdiri dari :
  - a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan nilai 5,40;
  - b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,

4



- menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan nilai 6,63; dan
- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan nilai 10,50.
2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,94 yang terdiri dari :
- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan nilai 4,20;
  - b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan nilai 6,94; dan
  - c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 10,80.
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,33 yang terdiri dari :
- a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan nilai 2,35;
  - b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan nilai 3,05; dan
  - c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 4,93.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 15,45 yang terdiri dari :
- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan nilai 3,50;
  - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dengan nilai 4,20; dan
  - c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan nilai 7,75.

Terhadap implementasi SAKIP tersebut, terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah belum membuat laporan kinerja secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama secara berkala belum di laksanakan.
3. Pemantauan atas rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja belum dilaksanakan secara berkala sehingga tidak dapat di ketahui progres pencapaian target kinerja.

#### **B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat laporan kinerja secara berkala
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama secara berkala belum dilaksanakan
3. Melakukan pemantauan atas rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja secara berkala sehingga untuk dapat diketahui progres pencapaian target kinerja.

### **III. Penutup.**

#### **A. Simpulan**

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dengan nilai sebesar 70.25 menginformasikan bahwa implementasi SAKIP dalam kategori Sangat Baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada jenjang di bawah eselon II dan komitmen dalam manajemen kinerja untuk selanjutnya dilakukan pembenahan secara memadai dan sistematis atas sebagian ruang lingkup SAKIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Q*

**B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik**

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP secara utuh di lingkungan Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi yang dibuktikan dengan hasil evaluasi sudah menunjukkan predikat Sangat Baik.

Namun apabila Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar ingin lebih meningkatkan predikat kinerjanya di masa yang akan datang, maka kami sarankan agar Saudara beserta seluruh jajaran untuk menerapkan manajemen kinerja di lingkungan instansi yang Saudara pimpin.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 untuk bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.



**INSPEKTUR,**

**HERRI OKSTARIZAL, SH, MH, CGCAE**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP.19810927 200502 1 001**



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
BULAN JANUARI S.D MARET TAHUN 2024

NILAI IKM

83,07

KINERJA UNIT PELAYANAN

Baik

BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

RESPONDEN

JUMLAH	+	42	ORANG
JENIS KELAMIN	+	L = 21 ORANG / P = 21 ORANG	
PENDIDIKAN	+	SD = ORANG	
	+	SMP = ORANG	
	+	SMA = ORANG	
	+	D3 = ORANG	
	+	S1 = ORANG	
	+	S2 = ORANG	

PERIODE SURVEI : 01 JANUARI 2024 s.d 31 MARET 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
BULAN APRIL S.D JUNI TAHUN 2024

NILAI IKM

79,95

KINERJA UNIT PELAYANAN

Baik

BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

RESPONDEN

JUMLAH : 37 ORANG  
JENIS KELAMIN : L = 21 ORANG / P = 16 ORANG  
PENDIDIKAN : SD = ORANG  
SMP = ORANG  
SMA = ORANG  
D3 = ORANG  
S1 = ORANG  
S2 = ORANG

PERIODE SURVEI : APRIL S.D JUNI 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
BULAN JULI S.D SEPTEMBER TAHUN 2024

NILAI IKM

82,70

KINERJA UNIT PELAYANAN

Baik

BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

RESPONDEN

JUMLAH : 22 ORANG  
JENIS KELAMIN : L = 3 ORANG / P = 19 ORANG  
PENDIDIKAN : SD = ORANG  
SMP = ORANG  
SMA = 13 ORANG  
D3 = ORANG  
S1 = 9 ORANG  
S2 = ORANG

PERIODE SURVEI : JULI S.D SEPTEMBER 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
BULAN OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN 2024

NILAI IKM

86,85

KINERJA UNIT PELAYANAN

Baik

BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

RESPONDEN

JUMLAH : 14 ORANG  
JENIS KELAVIN : L = 3 ORANG / P = 12 ORANG  
PENDIDIKAN : SD = ORANG  
SMP = ORANG  
SMA = 6 ORANG  
D3 = ORANG  
S1 = 11 ORANG  
S2 = ORANG

PERIODE SURVEI : OKTOBER S. D DESEMBER 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT